



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 8 April 2020
Waktu	: 10.00 WIB s.d 12.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK. IV)
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara	: Membahas Recofussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran sebagai Tindak Lanjut Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Recofusing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo / Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI: Hadir 35 orang Anggota dari 55 Anggota Komisi IV dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 6 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI 2. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 3. Vita Ervina, S.E., M.B.A. 4. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si. 5. Maria Lestari, S.Pd. 6. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

- 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)**
6 Dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua
 2. H.M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 3. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
 4. Ir. Ichsan Firdaus
 5. Budhy Setiawan
 6. Ir. Panggah Susanto, M.M.
 7. Alien Mus
- 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)**
7 dari 7 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil ketua
 2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
 3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 4. Ir. Sumail Abdullah
 5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
 6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 7. Dr. Azikin Solthan, M.Si.
- 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)**
4 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
 2. Fauzih H. Amro, M.Si.
 3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
 4. Julie Sutrisno
- 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**
4 dari 6 orang Anggota
 1. Daniel Johan/Wakil Ketua
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
 4. Edward Tannur, S.H.
- 6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)**
5 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
 4. Muslim, S.HI., M.M.
 5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
- 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**
5 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
 3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 4. H. Johan Rosihan, S.T.
 5. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

2 dari 4 orang Anggota

1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
2. Slamet Aryadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Ema Umiyyatul Chusnah

10. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL));
10. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

11. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM (BP2SDM));
15. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
16. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta jajarannya.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja ini dalam keadaan sehat wal'afiat walaupun dalam situasi COVID yang sedang melanda dunia dan termasuk juga Indonesia. Dan sebagian Anggota memakai virtual.

Sesuai dengan jadwal rapat DPR Masa Persidangan III Tahun 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Bamus tanggal 27 Maret

2020. Hari ini Rabu, 8 April 2020 Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas Recofussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Recofussing Kegiatan Realokasi Anggaran serta pengadaan barang, jasa percepatan penanganan corona virus disease corona virus 2019 (COVID-19).

Sesuai dengan Tatib, rapat hari ini kita dinyatakan terbuka dan untuk umum.

Setuju?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Rapat ini kita mulai pukul 10.00 dan Inshaa Allah secepat mungkin pukul 12.00 WIB sudah selesai.

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap agenda rapat,
3. Tanggapan Anggota Komisi IV,
4. Jawaban Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
5. Kesimpulan rapat,
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Sehubungan dengan semakin meluasnya penyebaran wabah COVID-19 yang pada tanggal 11 Maret 2020 telah ditetapkan sebagai pandemi global dan *World Health Organization* (WHO) maka Pemerintah melakukan langkah-langkah percepatan penanganan, diantaranya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus-19. Terkait hal tersebut Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memandang perlu untuk mengkaji kembali program dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut. Sehingga implementasi kegiatan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi rakyat didalam sekitar kawasan hutan beserta keluarganya, baik manfaat yang bernilai ekonomis maupun manfaat langsung dari usaha yang dikembangkan. Hal tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Recofussing Kegiatan Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang Jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus (COVID-19). Mengingat hal tersebut Komisi IV DPR RI meminta agar dalam melaksanakan recofussing kegiatan dan realokasi anggaran dilingkup unit kerjanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 menyatakan bahwa masa darurat COVID-19 adalah sampai tanggal 29 Mei 2020. Sehingga diperkirakan hampir seluruh sisa waktu pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 dapat dilaksanakan secara normal pada awal Juni 2020. Diharapkan kegiatan yang akan di refofusing dan anggaran yang akan direalokasi kegiatan anggaran hanya dapat berjalan efektif selama periode Bulan Juni sampai Desember 2020.
2. Pemerintah diharapkan dapat menanggihkan program investasi dan program Pemerintah lain tidak bersentuhan langsung dengan petani, termasuk didalamnya kelompok tani hutan, kelompok kehutanan, untuk meningkatkan hasil produksi yang sudah dikembangkan.
3. Selanjutnya rencana penggunaan anggaran yang ... tersebut difokuskan, disesuaikan dengan anggaran untuk kegiatan program yang sesuai dengan tugas fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut, diantaranya:
 - a. Bantuan untuk para petugas yang mengabdikan diri dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk didalamnya masyarakat peduli api ... Pak. Pekerja pada unit usaha pengelola limbah, bahan beracun, berbahaya dan yang lainnya.
 - b. Bantuan untuk pelaku usaha dalam kawasan hutan. Karyawan harian dalam kawasan hutan, seperti contohnya pawang gajah, pekerja taman wisata alam, dan lainnya.
 - c. ... program kebun bibit rakyat untuk kelompok tani hutan.
 - d. Program Bank Pesona untuk kelompok tani hutan, serta program lain yang bersentuhan dengan petani termasuk didalamnya kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Demikian pengantar ini kami sampaikan.

Selanjutnya persilakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal diatas.

Silakan Bu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera.

Pimpinan yang kami hormati,

Para Ketua dan Wakil Ketua, dan seluruh Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV yang saya hormati.

Pertama terima kasih atas undangan rapat kerja ini dan saya bergembira bertatap muka dengan Bapak/Ibu yang kami hormati, senang

semua, sehat. Dan kami juga ingin melaporkan ini grupnya agak besar karena saya minta seluruh Eselon I hadir, tambah BRG dan Dirut Perhutani Bapak dan Ibu sebagai penghargaan kami kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Mungkin kalau dilihat terlalu banyak. Mungkin pada Raker berikut kami akan cek lagi.

Bapak Pimpinan, dan Ibu/Bapak Anggota yang kami hormati,

Bahan secara tertulis telah kami sampaikan. Juga cukup tebal 143 halaman. Tetapi sebetulnya yang banyak disitu gambar-gambar visualisasi. Sistematisa sebagaimana surat dari yang terhormat Pimpinan Dewan yaitu berkaitan dengan kebijakan dasar. Tadi yang terhormat Pak Ketua sudah menyebutkan ada Inpres Nomor 4 Tahun 2020, begitu juga arahan-arahan Bapak Presiden pada Rapat-Rapat Kabinet secara teknis. Kemudian kebijakan dasar dan kebijakan operasional serta refofusing anggaran oleh KLHK sejak keluarnya Inpres tersebut dan juga ... kerjanya. Ini yang ingin kami laporkan hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya pencegahan dan mengatasi penyebaran COVID-19 didalam esensi dari substansi yang diperintahkan didalam Inpres. Kemudian upaya untuk atasi dan antisipasi dampak sosial ekonomi masyarakat dari COVID-19, kemudian kami juga mengembangkan untuk menjaga produktivitas aparat didalam Tupoksi Tadi Pimpinan juga menekankan soal menjaga Tupoksi KLHK, dan tentu saja manajemen dan administrasi.

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati,

Izinkan selanjutnya. Didalam chart ini, didalam dokumen kami ingin melaporkan secara sistematis. Dengan acuan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dan arahan Bapak Presiden pada Rapat-Rapat Kabinet sebagai kebijakan dasar adalah:

1. Kegiatan APBN untuk prioritas atasi pandemi COVID-19 dengan mengurangi dana perjalanan dinas, dan meeting.
2. Keselamatan masyarakat dan penanganan keberlangsungan ekonomi, serta menjaga tatanan masyarakat,
3. Mengatasi penyebaran pandemi,
4. Menjaga kehidupan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tetap mendapatkan penerimaan pendapatan dan stimulus ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Dari kebijakan itu Pak Ketua, Wakil Ketua, dan Ibu/Bapak Anggota yang kami hormati,

Kementerian LHK mengambil langkah-langkah sebagaimana tertera di chart sebelah kanan.

Prinsip-prinsipnya. Prinsipnya adalah untuk mengatasi krisis pandemi COVID-19 dalam hal mengatasi penyebaran virus, antisipasi dampak sosial ekonomi dan menjaga produktivitas aparat dan masyarakat. Artinya kita menjaga daya beli masyarakat, ... (suara tidak jelas). Tadi Pak Ketua juga sudah menegaskan didalam arahan-arahan pada bagian terakhir jika untuk

pembukaan Pak Ketua. Kemudian masyarakat sedapat mungkin tetap bekerja punya penerimaan dan juga disampaikan oleh Pak Ketua yang terhormat soal kapasitas medis tadi ada dukungan juga. Kemudian kami juga berusaha untuk produktivitas semaksimalnya didalam kondisi yang sulit ini sehingga ada optimisme. Tadi Pak Ketua juga ... soal bantuan kepada ..., manggala ahli sampai ... yang sangat positif dan sebagian sudah kami lakukan, tapi sebagian lagi kami akan perhatian dan kita coba sesuaikan didalam penyelesaian berikut serta Rapat Kerja ini.

Pimpinan dan Ibu/Bapak Anggota yang saya hormati,

Selanjutnya kalau kita lihat secara rinci, apa saja yang dilakukan di KLHK berkenaan dengan pencegahan atasi penyebaran dengan langkah-langkah. Pertama kelembagaan kebijakan Work From Home (bekerja dari rumah) termasuk telecon zoom dengan virtual seperti ini. Itu mohon dilihat pada halaman 24 sampai dengan 41.

Kemudian dukungan bagi kegiatan medical. Tadi Pak Ketua juga menyebut soal APD dan sebagainya, dan bagi tenaga medis dan dukungan ... ataupun dengan herbal ataupun hasil-hasil hutan bukan kayu yang merupakan makanan-makanan tradisional dari hutan.

Kemudian dukungan fasilitasi kebersihan dimasyarakat dan ... bersih cuci tangan, bekerjasama dengan Asosiasi baik APYAI maupun YLKI di mohon periksa tadi bagi kegiatan tenaga medis pada halaman 42 sampai halaman 52 visualisasinya. Kemudian dukungan fasilitasi kebersihan dimasyarakat dan gerakan bersih cuci tangan. Visualisasinya pada halaman 57 dan 67.

Kemudian menata perkantoran secara fisik Pak Ketua. Jadi tempat dan ruangan standar operasional prosedur ... kesiagaan tenaga medis dan satpam termasuk alat diklat dan lain-lain. Ini visualisasinya pada halaman 67 sampai 81, dan pemantauan dan dukungan pangan bagi pegawai yang sakit dan golongan rendah serta Kami perhatikan ini nanti ada catatan yang terhormat Pimpinan bahwa dikaitkan juga dengan karyawan-karyawan yang bekerja juga di kawasan hutan. Dan juga tugas-tugas yang terkait dengan sampah. Kemampuan kapasitas ... ini kami perhatikan. Itu bagian yang pertama.

Bagian operasional yang kedua yaitu antisipasi dampak sosial ekonomi masyarakat melalui kegiatan, menjaga keberlangsungan sektor usaha kehutanan dengan stimulus ekonomi. Jadi bagian yang ketiga ini seluruhnya di halaman 88 sampai 124. Visualisasinya mohon periksa untuk stimulus ekonomi pada halaman 106 sampai 116 yang isinya kita mengupayakan usulan dan kemarin dibahas. Sebelumnya mungkin kami melaporkan Pak Ketua, bahwa dengan situasi *COVID* ini memang seperti kita pahami, seperti dunia yang lain, di dunia usaha kehutanan juga mengalami atau terkena pengaruh. Demikian juga yang dalam kaitan dengan kayu hasil olahan, kemudian ..., industri dan lain-lain itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu kami konsultasikan dan memang sudah ada arahan dari Bapak Presiden

untuk dilihat semua sektor dan kami sudah melaporkan kepada Pak Menko dan sudah dibahas. Hanya memang usulan kami ada banyak Pak Ketua. Mohon diperiksa di halaman 106 sampai 116. Tetapi yang penting juga bahwa ketika diumumkan COVID maka KLHK memutuskan untuk menutup pada Bulan Maret itu kawasan-kawasan wisata di Taman Nasional dan wisata alam. Pada saat itu masih 71 yang kita tutup. Tetapi sejak gelombang ke-2 dengan proyeksi tadi yang telah disampaikan juga oleh yang terhormat Ketua dari Surat Keputusan BNPB sampai bulan Mei, maka Taman Nasional yang kita tutup sudah seluruhnya 54, taman wisata alam 133, dan 79 suaka margasatwa. Ini kita tutup.

Kemudian pengaruh yang lain Pak Ketua, mohon ijin kami sampaikan juga bahwa lembaga konservasi juga terpengaruh karena satwa-satwanya susah dapat makan. Biasanya dapat makan itu dari retail-retail, supermarket, Alfamart, dan lain-lain, dari buah-buahan yang di ... yang cacat sedikit itu biasanya dikasih ke satwa-satwa kita. Oleh karena itu ini juga harus kita tangani dan kita perlu mensubsidi untuk pangan satwa.

Kemudian yang ketiga yang paling penting tadi ditegaskan oleh. Yang berikutnya dibagian ke-2 dari langkah dampak sosial ekonomi adalah mempertahankan kinerja kelompok usaha perhutanan sosial dengan percepatan *obstacle product* untuk penerimaan bagi kelompok dan juga pendapatan bagi anggota sehingga kegiatan masyarakat tani hutan tidak stagnan atau tidak putus. Jadi kita berusaha terus mengikuti. Disini beberapa kegiatannya seperti juga kita mempercepat dukungan sarana ekonomi produktif bagi kelompok. (... chartnya dulu saja yang di *screen*).

KETUA RAPAT:

(suara tidak jelas).

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Kemudian mempercepat dukungan sarana ekonomi produktif bagi kelompok tani dan/atau Tadi yang disampaikan oleh Ketua yang terhormat dalam sambutan pembukaan. Kita mempercepat Bank Pesona dan bantuan ekonomi produktif. Percepatan kalau menurut Peraturan Presiden yang baru dan arahan Bapak Presiden di Kabinet Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati, itu paling tidak harus dicover dalam 4 bulan. Jadi bisa diselesaikan.

Kemudian berikutnya langkah untuk menjaga produktivitas masyarakat dan aparat, dan upaya menjaga ketahanan nasional melalui langkah-langkah. Mengupayakan agar Tupoksinya KLHK tetap berlangsung dalam hal pelayanan umum perijinan, pembinaan, pengawasan maupun ... hukum. Jadi semua Direktorat Jenderal tetap dalam langkah-langkahnya termasuk Badan Litbang ... juga ... mempunyai kegiatan-kegiatan. Dan nanti visualisasinya Pak Ketua mohon diperiksa pada halaman 117 sampai 123, dan 125 sampai 137. Kemudian dalam kaitan ini juga beberapa kegiatan sebetulnya masih tetap bisa dilangsungkan Pak Ketua sehingga kita tidak akan stagnan di anggaran

pada bulan-bulan ini sampai dengan Mei. Karena seperti beberapa kegiatan pendidikan itu juga bisa disesuaikan, misalnya ... melakukan penyesuaian dengan pendidikan tatap muka. Kemudian juga kepada anak-anak yang sudah di kelas 3 dan menunggu kelulusan, itu dipulangkan kerumahnya lalu diberi pekerjaan rumah untuk bidang dilombakan semacam tulisan, lalu dilombakan lalu nanti diberi hadiah, dan juga BP2SDM kerjasama dengan ... kehutanan. Demikian juga diklat-diklat ... sosial Pak Ketua, dalam hal manajemen. Ini juga pakai virtual juga, jarak jauh. Jadi sudah dipersiapkan oleh Dirjen KSKL. Demikian juga diklatnya Ini juga disiapkan untuk para ... dilapangan dilakukan diklat-diklat dengan sistem virtual. Jadi ada modifikasi-modifikasi sehingga semua tetap berjalan. Kami juga sebetulnya secara ketat melakukan interaksi dengan para Pejabat Eselon I dan Eselon II tertentu untuk beberapa hal yang harus kita selesaikan. Kalau pakai ukuran dokumen sebetulnya sih yang kerumah saya tetap saja belum bisa banyak.

Kemudian terakhir adalah manajemen dan kontrol oleh kami. Pak Ketua, saya mohon ijin melaporkan bagian terakhir yang baru keluar kemarin yaitu Peraturan Presiden Nomor 54. Peraturan Presiden Nomor 54 ini materinya secara umum adalah ..., kemudian penghematan pagu KLHK dari awal Rp9.319.325.816.000,00 harus dihemat dengan sistem ... *blocking* menjadi Rp7.736.642.116.000,00. Fokus belanja didalam Perpres itu ditegaskan yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian. Tentu bagi KLHK lebih banyak kepada masyarakatnya sambil tetap kita memberikan dukungan menjaga keberlanjutan dunia usaha.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri sebentar saya tanyakan. Dari selisih anggaran ini bukannya di realokasi atau dikurangkan tapi di *blocking* dulu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Dikurangi langsung Pak.

KETUA RAPAT:

Dikurangi atau di-*blocking*?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ya langsung dikurangi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Langsung dikurangi anggarannya, bukan diblocking, bukan dibintang. Bukan?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Bukan. Dikurangi ... tapi kita yang milih sendiri yang dikurangnya apa.

KETUA RAPAT:

Oke-oke paham.

Lanjutkan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Siap Pak Ketua, terima kasih. Dengan pendekatan itu kami telah mencoba meneliti Perpresnya tadi malam hingga pagi ini yaitu orientasi untuk KLHK dalam penghematan hampir 1,6 Triliun ini adalah, pertama untuk keselamatan dan mengatasi penyebaran pandemi. Kedua, keberlanjutan usaha ekonomi kehutanan, kemudian konservasi dan hutan sosial. Yang ketiga mendorong semua kegiatan yang mengcover padat karya. Jadi yang memberikan pendapatan kepada masyarakat kecil. Kemudian stimulus ekonomi, kemudian keberlanjutan pelayanan publik dan ... pembinaan KLHK Tadi yang terhormat Pak Ketua mengingatkan kami soal MPA, ..., pekerja sampah, karyawan yang dikawasan kehutanan ini di KLHK ini Pak Ketua. Ini yang akan menjadi perhatian kami Pak Ketua.

Terus. Kriterianya dengan demikian kami nanti mohon pandangan, arahan maupun catatan-catatan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI untuk selanjutnya setelah ini kita lakukan exercise untuk pengurangan tersebut. Yang sudah kami pikirkan bersama-sama adalah pertama, kita memproyeksikan bahwa asumsi pelaksanaan 6 bulan. Beberapa kegiatan yang harus diselesaikan sekarang. Tadi seperti padat karya itu harus tidak terpengaruh dengan demikian. Jadi yang kegiatan-kegiatan yang hanya bisa diselesaikan dalam waktu singkat ini yang harus menjadi kriteria untuk kita mengurangi. Kemudian kegiatan yang memerlukan kepastian penentuan lahan dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kemudian mohon ijin juga kami ingin mengevaluasi kinerja anggaran dari semua Eselon II. Jadi bukan Eselon I sekarang. Eselon I dan tentu saja Eselon II selama Tahun 2017, 2018, dan 2019. Kalau yang kinerjanya katakanlah hanya 60%, 70% ya sudah didrop saja kira-kira.

Kemudian perjalanan dinas, tentu paket meeting, lalu belanja modal yang bisa ditunda serta penyesuaian target volume kegiatan. Dalam kaitan ini yang kami sepakati bahwa seperti kebun bibit itu akan bertambah malah karena kita membutuhkan padat karyanya, kemudian juga Bank Pesona tetap harus tidak boleh diganggu. Jadi beberapa hal yang menjadi ciri pokok kita itu tidak pertahankan dan berdampaknya sangat kuat bagi masyarakat.

Kemudian kegiatan yang perlu dikurangkan adalah belanja operasional dan belanja pegawai. Program-program atau kegiatan yang dibiayai dengan surat berharga syariah negara, hibah luar negeri (salah ketik Ketua mohon maaf. Kita tidak ada hutang luar negeri). Kehutanan ini tidak mau dia punya hutang ke Luar Negeri Pak Ketua dan Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati. Jadi disini di KLHK tidak ada loan. Adanya hibah Luar Negeri. Kemudian yang

pendamping. Lalu prioritas nasional yang terkait Bank ... masyarakat prioritas bidang ini yang sangat kuat menunjang, kemudian pemeliharaan ..., dan kegiatan yang multiyears.

Bapak Pimpinan, dan Ibu/Bapak Anggota yang kami hormati,

Saya mohon ijin sedikit lagi untuk secara cepat menambahkan visualisasi. Kita lihat misalnya *work from home* dihalaman 37-38. Ini seperti ini Pimpinan.

Kemudian untuk kegiatan dukungan bagi kegiatan medik dan tenaga medik dihalaman 44, 45, 53. Ini ... (suara tidak jelas). Nah terpaksa memang kita didalam membantu kegiatan medik kita Dirjen PPKL dan Dirjen PSLB3 itu mensupervisi juga Wisma Atlet pada saat persiapan dengan sistem penanganan limbah medisnya, dan penanganan ... air yang habis dipakai. Jadi itu kita terlibat juga ... itu. Terus halaman 55. Halaman 56.

Kemudian di kegiatan berikut dukungan fasilitasi kebersihan masyarakat dengan gerakan cuci tangan. Pimpinan ini juga saya mohon ijin mau laporkan bahwa dari hasil-hasil hutan sosial yang secara umum adalah produk-produk kearifan lokal itu juga seperti madu. Madu yang diinginkan banget oleh rumah sakit-rumah sakit, para petugas, dokter, suster, madu, kemudian gula aren, macam-macam. Kemudian dibelikan juga di daerah-daerah juga.

Kemudian kegiatan yang gerakan bersih cuci tangan dilapangan. Ini kita kasih sabun antiseptik, terus juga langkah-langkah untuk membantu disinfektan dimasyarakat. Ini juga bantuan sabun dan sanitiser. Nah ini kegiatan membersihkan kantor. Jadi di kantor juga kita urus juga Pimpinan, dan Ibu/Bapak yang kami hormati. Saya sih mintanya ke Pak Sekjen 2 minggu sekali. Kita yang ada PDP (Pasien Dalam Pengawasan) ada 2 orang Pak Ketua. Ada 2 orang. Saya baru dapat kabarnya 2 orang ini juga baru 2 hari ini ya. Satu di PSKLSatu di KSDAE tapi di daerah di Semarang. Ini kita kontrol terus, kita ikuti terus. Sudah sembuh ya ... jadi tinggal satu. Ini di daerah juga kita lakukan semprotan disinfektan. Pelayanan klinik juga kita tingkatkan. Ini kliniknya KLHK. Pimpinan dan Bapak/Ibu anggota Ini juga produksi disinfektannya ... dari Litbang dan Badan Litbang. ... (suara tidak jelas).

Nah selain itu juga dilakukan kegiatan kepada security dan tenaga medis KLHK. Jadi ada pelatihannya juga. Ini pelaksanaan pelatihan. Juga tenaga kebersihan di taman-taman nasional. Ini suplemen untuk daya tahan tubuh di daerah. Terus ini kondisi gambaran pegawai juga gambarannya.

Kemudian visualisasi berikut dalam kaitan dengan tadi untuk stimulus kami sudah laporkan. Untuk yang stimulus dihalaman 90, 93, 95. Jadi Dirjen PHPL dalam hal ini PLT-nya adalah Pak Sekjen juga menjelaskan kepada dunia usaha kehutanan untuk menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah. Sekarang sebagaimana arahan yang terhormat Pak Ketua disini juga ada Dirut Perhutani. Dan Dirutnya adalah Pak Wahyu Kuncoro. Sekarang

bersama-sama kami juga jadi termasuk Pak Wahyu juga untuk menyesuaikan dengan kondisi kita juga dunia usaha swasta. Dan setelah ini kita minta lagi, kita akan jelaskan lagi kepada dunia usaha di lingkup kehutanan untuk menyesuaikan dengan kondisi protokol *COVID* dan pakai masker, dan bekerja dengan sistem berjarak dan lain-lain, dan lebih mengutamakan padat karya. Halaman berikutnya dulu 93. tadi sudah kami laporkan 95. Ini yang ditutup-tutup.

Kemudian 108. Nah ini tadi sudah kami laporkan realokasi kebijakannya. Jadi kebijakan yang kami usulkan kepada Pak Menko adalah pembayaran dana reboisasi itu tidak lagi dalam U\$ tapi dalam Rupiah. Karena dengan situasi sekarang kita harusnya jangan banyak-banyak beli U\$ yang ada bisa makin susah dan menjadi sulit. Dan ini adanya didalam PP. Kemudian kita juga minta keringanan pembayaran PNBPN. Jadi dengan kelonggaran angsuran. Kemudian juga kita meminta penurunan pajak ... dari 15 menjadi 5 persen. Kemudian penjadwalan kembali pembayaran pinjaman perusahaan sektor kehutanan. Pembayaran pinjaman ditunda sampai waktu 1 tahun. Termasuk yang kami usulkan juga didalam THR. Kita juga termasuk yang ... bahwa THR dunia usaha kehutanan itu perlu dibantu, apakah ... melalui BLT atukah dengan pinjaman dan sebagainya. Ini kelihatannya sangat banyak masukan dari segala sektor ... Menko, Pak Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati dan ini sedang dipersiapkan.

Kemudian ini produk-produk hasil hutan di TSKL di kelompok-kelompok tani hutan ... yang perlu dibantu untuk mendapatkan chanel atau jalur pemasarannya sehingga ... produknya oleh Kementerian untuk diberikan sebagai dukungan kepada tenaga-tenaga medis.

Ini minyak kayu putih sudah di Sulawesi Selatan. Tentu ... kami baru dapat dokumennya. Harganya juga naik. Ini bantuan sarana produktif. Ini baru 1 yang kami try dengan cara juga virtual. Tapi saya bilang jangan dilanjutin dulu, kita lihat perkembangannya. Tetapi menurut pandangan kami seharusnya memang bantuan-bantuan ekonomi ini kepada kelompok tani hutan ini harusnya dipercepat.

Nah ini untuk menjaga produktivitas. Ini ... tetap bekerja. Pemadaman kebakaran dilakukan. Kemudian di halaman 125, 137. Ini ... tadi kami sudah melaporkan yang soal pelatihan dengan sistem virtual. Itu kurang lebih. Maaf Pimpinan untuk selanjutnya untuk Perpres 54 tadi sudah kami laporkan. Dan mohon ijin Pimpinan dan Ibu/Bapak Anggota yang kami hormati, pada kesempatan ini sebagai penutup. Kami mohon perkenan arahan atau pun catatan-catatan ... untuk selanjutnya kita lakukan exercise didalam pengurangan 1,6 Triliun. Saya mohon maaf belum berani menyampaikan konfigurasinya karena baru tadi malam kami dalam Nanti dari catatan dan arahan yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI kita lakukan exercise dan saya mohon berkenan untuk kami diberi kesempatan untuk melaporkan kembali pada Rapat Komisi IV DPR RI yang terhormat ini.

Demikian kurang lebih yang ingin kami laporkan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak tepat.

Terima kasih.

*WabillauhiTtaufiq Walhidayah,
Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Bu Menteri, saya hanya menambahkan saja. Selama ini pelaku HTI kan. Pelaku pengusaha HTI kan untungnya besar sekali. Kontribusinya apa kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Saran saya, minta CSR kepada mereka berupa APD dan lain-lain. Jangan berupa uang tunai, tetapi bantuan APD untuk seluruh karyawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk di taman-taman nasional, kemudian tukang kebersihan sampah dan lain-lain. Ini himbauan saya kepada Menteri untuk dimintakan CSR-nya. Jadi jangan meminta uang tunai. Tetapi belikan barangnya. Kalau perlu setiap Kabupaten harus ada CSR dari pengusaha HTI, maupun pengusaha tambang. Yang mana kita tahu semua pengusaha tambang ini pinjam pakai seenaknya saja. Ini saran saya kepada Menteri untuk dijalankan. Apabila perlu minta persetujuan nanti dengan Anggota untuk kami sampaikan dalam kesimpulan rapat.

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan.

Selanjutnya persilakan kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan.

Yang pertama Fraksi Golkar diwakili Pak Dedi Mulyadi. Silakan. Saran saya singkat, jelas.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih Bu Menteri.

Bahwa problemnya kan sekarang dirasakan oleh semua. Tapi apa yang dipaparkan itu bersifat visual yang barangkali di daerah-daerah Pemilihan kita tidak melihat aksi-aksi itu. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kami bantu untuk membangun sebuah aksi-aksi yang nyata di masyarakat yang didorong oleh Kementerian KLH. Karena selama ini masyarakat selalu DPR buat apa, DPR buat apa. Kalau potong gaji seterus semuanya kan tidak bisa juga. Gaji tidak cukup untuk bagi-bagi APD, bagi-bagi kegiatan sosial. Saya pikir dana-dana dari Kementerian yang didukung oleh kalangan swasta harus segera didistribusikan dengan cepat. Itu saja.

Terima kasih. Di Daerah Pemilihannya masing-masing.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dedi.

Selanjutnya Pak Kanjeng Dirjen silakan.

Pak Darori silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Bu Menteri yang kami hormati,

Setelah mendengar apa yang disampaikan Ibu ada beberapa hal. Mohon waktu Pak Ketua. Terkait juga dengan Perpres 54. Tadi saya lihat perincian didalam pengalihan anggaran dalam rangka virus corona ini. Mohon diperhatikan karena Kementerian Kehutanan selain melaksanakan atau juga pemangku kawasan dan jaga hutan. Jadi kegiatan-kegiatan yang menyangkut dampak dari virus corona ini antara lain mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, pengendalian B3, restorasi gambut, menjaga patroli hutan, penegakan hukum. Ini juga mohon jadi perhatian ditambah Irjen anggarannya jangan dikurangi ini. Karena ini nanti dampak dari virus ini akan menggunakan masyarakat di kawasan hutan itu akan berusaha cari yang mudah.

Nah terkait dengan pengadaan yang saya lihat hampir setiap Eselon I itu mengadakan barang dan jasa untuk kegiatan *COVID-19*. Hati-hati Bu. Karena ini pengalaman dulu. 1 Dirjen ini bisa membeli barang yang sama, harganya berbeda. Nah ini tolong jangan sampai terjadi, apakah pengadaannya dipusatkan oleh Sekretariat Jenderal atau itu terserah Pimpinan pada Bu Menteri.

Terus yang kedua terkait dengan Perpres 54 yang 1,58 Triliun, 2 Triliun itu. Kami sarankan pengambilan dananya antara lain dalam rangka ... Ibu. Karena ini waktunya tinggal delapan bulan Pengadaan bibit dan penanaman tidak mungkin bisa dilaksanakan maka bibitnya saja disiapkan untuk ditanam di Tahun 2021 sehingga biaya penanaman jadi di hold yang 1,58 termasuk juga di Konservasi Sumber Daya Alam juga demikian.

Satu lagi ada titipan Bu. Permenjak Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 18 Februari ini diprotes, kenapa Kementerian Perdagangan mengatur dari hulu-hilir kecuali untuk industri kayu itu. Ini komitmen kita selama ini sudah bagus dengan ... di Eropa bahwa kita mengeksport cairan yang ramah lingkungan. Tapi dengan adanya ini sistem verifikasi ... kayu akan dicabut. Ini banyak protes-protes. Mohon jadi perhatian dan mohon tanggapan Ibu. Kalau kami sendiri kurang sependapat karena sistem verifikasi legalitas kayu itu sudah baik. Karena ... sudah tepat utama katanya akan meningkatkan ekspor. Yang kedua mengatasi *COVID-19*. Ini tidak tepat.

Terus yang terakhir Bu. Mungkin secara khusus pada pertemuan yang akan datang bahwa Perhutani ternyata semakin kebawah sekarang ini semakin rusak. Dengan alasan-alasan saya kira sudah pernah saya sampaikan. Jadi saya akan berpikir apakah Perum Perhutani ini ada ... berubah atau mungkin Perum Perhutani dibubarkan dikembalikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

Demikian Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Kanjeng.

Selanjutnya Pak Johan.

Silakan Pak Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang pertama menurut kami refofussing yang dilakukan oleh Kementerian ini terlalu sedikit Pak Ketua. Itu Cuma 2,47%. Sarana saya kita samakan dengan pihak lain menjadi ... kita agar refofussingnya itu sampai 10% dari anggaran yang tersedia.

Yang kedua, kami ini bukan refofussing yang dilakukan oleh Kementerian tetapi memang belanja-belanja yang tidak dipakai, seperti mengurangi meeting, perjalanan dinas dan sebagainya. Banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya masih bisa dikurangi dan difokuskan kepada yang masih bisa dikerjakan untuk COVID ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra.

Berikutnya yang ketiga Pak Ketua, saya minta tolong kepada Bu Menteri agar pekerjaan-pekerjaan padat karya yang dilakukan di Taman Nasional terutama Taman Nasional Rinjani, itu jangan ada yang dikurangi Ketua. Sebab itu adalah penanganan pasca gempa. Walaupun taman nasional di tutup. Kalau anggarannya terutama proyek-proyek penataan jalur segala macam Taman Nasional Rinjani agar tetap menjadi perhatian.

Yang terakhir, supaya tetap memperhatikan kesejahteraan petani sekitar hutan. Jangan sampai mereka terdampak agar anggaran-anggaran soal pembagian masker, alat-alat pelindung diri dan segala macam itu tetap diberikan kepada mereka. Jangan diserahkan Kementerian Sosial misalnya atau diserahkan Kementerian Kesehatan. Tetapi pengurangan anggaran kita harus dipergunakan kembali untuk kita. Keluar kiri, masuk kanan. Jadi jangan diberikan ke Kementerian lain tetapi adalah untuk stakeholder yang disebut

oleh Pak Ketua tadi. Contoh misalnya, pasukan siaga api terutama pegawai-pegawai honorer di Kehutanan yang banyak sebagai penjaga hutan kita.

Berikutnya soal terlalu besarnya anggaran refofusing di gambut, sampai 17% datanya disitu. Padahal sebentar lagi sesuai dengan BMKG kita sudah masuk musim panas ini. Nah karenanya tolong di Sekjen itu yang banyak dikurangi Pak Ketua. Itu Cuma 1%. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang kita antisipasi, ya kejadian-kejadian setiap tahun seperti gambut ini mengalami perubahan yang sangat besar.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Doktor Hermanto. Singkat.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Bu Menteri, Pak Ketua.

Ada 3 hal Pak Ketua. Pertama, saya ingin mengingatkan bahwa ... (suara tidak jelas). Artinya anggarannya tidak itu-itu saja. Saya minta supaya Bu Menteri mengusulkan anggaran tambahan. Karena ada anggaran yang ... Triliun itu. Dan kalau bisa yang saya dengar itu pembangunan Ibukota baru juga sudah mulai ditunggak. Jadi anggaran ini ... Bu Menteri bisa siasati.

Yang kedua Bu Menteri, ini akibat COVID ini menimbulkan Jadi sampah ... itu semakin bertambah. Nah ini membahayakan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu saya minta pengolahan sampah ... perlu diefektifkan kalau bisa program-program yang selama ini tersendat itu saya kira juga ada sangsinya, misalnya di Sumatera Barat. Itu pengolahan ... itu sebenarnya harus ... karena itu bisa memudahkan kita untuk mengolah limbah ... sehingga kita mencegah meluasnya COVID ini.

Kemudian yang ketiga, saya minta nanti pada saat ada program pencegahan terkait dengan APD dan juga masker dan ... itu. Pada saat nanti ada ... maka saya sarankan supaya itu diprioritaskan ke Dapil Anggota. Dan juga ini saya sarankan pada masyarakat sekitar hutan, pada masyarakat yang membantu lingkungan, kemudian masyarakat yang terlibat dengan sampah perkotaan. Nah itu saya minta supaya ... ini dikoordinasikan dengan Anggota supaya Anggota juga tahu bahwa titik-titik penyebaran alat ini seperti apa. Dan disini kehadiran Anggota Ibu bisa lebih efektif.

Demikian Pak Ketua dan Bu Menteri.

Sekian.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

Selanjutnya Pak Hasan Aminuddin mewakili Fraksi NasDem.

Silakan.

Pak Kyai Hasan?

Yang mewakili PPP. Ibu Ema, silakan.

F-PPP (EMA UMIYATUL CHUSNAH):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kepada yang kami hormati Ibu Menteri beserta jajaran,
Bapak Pimpinan beserta Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Semoga hari ini dan seterusnya kita diberikan kesehatan oleh Allah
Subhanahu Wata'ala. Aamiin.

Ibu Menteri,

Yang ingin saya sampaikan berdasarkan SE Menteri LHK terkait pengelolaan limbah B3 terutama sampah, hubungan dengan masker yang sekali pakai. Kami mohon KLHK untuk memberikan sosialisasi terkait penanganan limbah dampak COVID-19 ini tentang pembuangan masker sekali pakai. Baik itu melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial. Kami menghimbau KLHK bisa mengedukasi masyarakat untuk melakukan penghancuran masker sekali pakai sebelum dibuang sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19. Jadi mohon edukasi kepada masyarakat untuk kencang digalakan sesuai dengan SE Menteri.

Yang kedua, kami melihat refofusing kegiatan disemua Dirjen mayoritas pengadaan barang dan jasa, baik meliputi masker, hand sanitizer, hand soap, disinfektan, pembuatan ... dan sebagainya. Kami mohon Menteri realisasinya nanti kami sebagai Anggota Komisi IV, tidak menutup kemungkinan pada semua masyarakat apalagi hari ini digalakan untuk keluar rumah harus menggunakan masker. Untuk pengadaan masker didaerah-daerah kami memang agak kesulitan terutama kepada masyarakat di pedesaan. Mereka sangat butuh sekali masker. Kami mohon kami juga nanti diberi masker, hand sanitizer, hand soap, yang mungkin dibutuhkan

masyarakat terutama didaerah kami. Mungkin itu Bu Menteri yang bisa kami sampaikan.

Kami mohon maaf dan terima kasih.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

Pak Hasan sudah on belum?

Kalau Pak Hasan belum. Pak Ansy Lema, silakan. Mewakili PDI-Perjuangan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan yang terhormat, Ibu Menteri dan jajarannya.

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama Bu, saya mendukung insentif ekonomi dan juga Bansos untuk masyarakat atau pun petani disekitar hutan Bu. Kita tahu perhutanan sosial itu kan memberikan manfaat ekonomis dan juga ekologis. Konkritnya Bu, permodalannya ditambah, akses pasar diperhatikan, teknologinya juga lebih diperhatikan lagi.

Yang kedua Bu, saya mau bicara soal beberapa destinasi wisata yang dibawah KLHK seperti Taman Wisata Alam dan Taman Nasional yang kita tahu punya dampak sangat signifikan. Nah konkrit Bu, kalau bisa insentif khusus juga buat masyarakat yang ada disana. Saya ingin mengambil contoh misalnya Taman Nasional Komodo. Kita tahu bahwa disana ada 3 desa penyanggah. Desa yang masuk dalam Taman Nasional Komodo. Saya ingin KLHK memberikan atensi khusus, keberpihakan yang khusus sehingga kemudian masyarakat yang menyandarkan hidup dari pariwisata yang kita tahu hari ini berdampak sangat akut itu juga bisa menyambung hidupnya dengan bantuan dari KLHK. Dan ada hal lain Bu, kita tahu bahwa disekitar Taman Nasional Komodo itu banyak sekali kapal yang selama ini mengangkut turis dan lain-lain, kemungkinan besar juga mereka akan melaut. Yang harus diperhatikan adalah teknologi yang mereka pakai Bu untuk mendapatkan ikan dan lain-lain, jangan sampai mencemari laut yang sebenarnya itu juga adalah wilayah konservasi.

Saya kira itu 2 hal yang bisa saya sampaikan Bu. Saya kembalikan.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Demokrat Pak Suhardi Duka.
Silakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat siang,

Pak Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat yang saya hormati,
Ibu Menteri bersama jajarannya Eselon I yang juga saya hormati.

Dari penjelasan yang Ibu berikan sangat komprehensif. Saya support, saya berikan dukungan utamanya didalam merencanakan stimulus yang Ibu rancang didalam rangka menyanggah masyarakat perhutanan dan sekitar hutan. Saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh Ketua terhadap pelak usaha HTI yang mendapatkan keuntungan yang besar agar juga berkontribusi secara nyata dalam penanganan COVID-19 ini.

Pertanyaan saya adalah berdasarkan dengan Perpu Nomor 1 ... dan Perpres Nomor 54. Disana ada kewenangan yang sangat besar terhadap KSSK. Bagaimana hubungan Kementerian KLHK dengan KSSK yang akan mengelola dana kurang lebih 405 Triliun dari hasil pengurangan dari seluruh Kementerian dan pinjaman Luar Negeri. Yang pertama.

Yang kedua adalah saya meminta supaya mengoptimalkan hasil-hasil ekspor dari sektor kehutanan supaya bisa menyanggah ekonomi Indonesia.

Yang ketiga, impor sampah atau yang ... sampah itu betul-betul distop, diawasi benar. Karena sampah yang akan masuk nantinya itu ikut COVID. Dengan demikian pengawasan terhadap impor yang berkaitan dengan sampah itu betul-betul diawasi dengan ketat.

Yang terakhir adalah stimulus yang Ibu rancang itu sebaiknya juga di share kepada Anggota Dewan supaya Anggota Dewan membantu kehutanan. Supaya dengan demikian kita bareng-bareng kerja dan fungsinya akan kita dapatkan secara bareng-bareng.

Demikian.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi PAN, Pak Rudi silakan.

Pak Rudi sudah siap?

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Siap.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bapak Ketua, dan teman-teman sekalian, dan Ibu Menteri, Pak Dirjen, Sekjen serta ... (suarat tidak jelas).

Saya ingin menyampaikan dan menindaklanjuti, tadi disampaikan oleh teman saya Johan mengenai Gunung Rinjani. Saya justru ke Gunung Tambora karena Daerah Pemilihan saya di Pulau Sumbawa. Tolong jangan sampai dalam alokasi, realokasi ini dikurangi karena kasihan sekali di Tambora sudah jauh dan di ujung negeri ini. Tolong diperhatikan dan jangan sampai dipotong atau dipangkas.

Yang kedua Bu Menteri. Kalau ada realokasi atau alokasi untuk alat-alat APD dan yang lain, mohon disampaikan kepada Bapak-Bapak ditingkat I untuk tidak susah kami untuk mendapatkannya. Jangan sampai sana sini, sana sini, susah sekali Bu Menteri. Jadi diingatkan. Bila perlu kami di Komisi IV ini diprioritaskan untuk mendapatkannya. Itu yang kedua.

Yang ketiga, salam hormat dari ujung tombak di kehutanan yaitu teman-teman KPH tetap diperhatikan supaya mereka tetap stabil dalam melaksanakan tugas walaupun kondisi bangsa dan negara ini seperti ini. Terutama tadi mereka meminta ada ... (suara tidak jelas).

Saya kira itu Ibu Menteri. Mudah-mudahan Ibu Menteri dan seluruh jajaran sehat selalu, panjang umur dalam rangka mengabdikan diri kepada Bangsa dan Negara.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi PKS, Pak Slamet Sukabumi, bukan Slamet bebek.

Silakan Pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pak Ketua. Mudah-mudahan sehat.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kepada Pak Ketua yang saya hormati, rekan-rekan.
Ibu Menteri dan seluruh jajaran Eselon I di KLHK.

Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya tertarik dengan usulan Pak Ketua tadi. KLHK diminta untuk meminta CSR dari pengusaha-pengusaha itu. Saya usul Pak Ketua, kalau bisa dipanggil oleh Komisi VI. Kita juga ingin mendengarkan apa kontribusi pengusaha itu terkait dengan kasus ini. Sehingga itu kita menyaksikan dan mendengarkan sendiri dan kita bisa mengarahkan itu. Itu usulan pertama Pak Ketua.

Yang kedua, terkait dengan berita yang beredar ini bahwa MA sudah intrah keputusannya bahwa pelanggar-pelanggar itu ada nilai denda sekitar 18,3 Triliun itu Bu Menteri. Memang mungkin eksekusi tidak di KLHK tetapi ketika kemudian dalam hal ini leading sektornya yang terugikan adalah KLHK, bisa tidak kemudian KLHK ini kemudian KLHK menseseriusi masalah ini. Karena menurut pandangan saya, negara punya kekuatan, negara punya alat untuk kemudian memaksa para pengusaha untuk membayar yang sudah incrah oleh keputusan MA ini. Biasanya kalau masalah umum yang dalam pengadilan perdata itu mungkin masih sulit untuk kemudian dilakukan eksekusi. Tapi ini kan posisinya negara sehingga bisa menarik dana dari denda yang sudah diputuskan oleh MA.

Yang ketiga, saya hanya mengusulkan dengan kejadian *COVID-19* ini maka nampaknya setuju dengan teman-teman yang lain. Jejaring pengaman sosial di masyarakat disekitar hutan atau petani disekitar hutan ini nampaknya perlu direalisasikan. Sederhana saja memang dalam bentuk bantuan sembako yang lebih real. Memang dari sisi itu, masker dan lain-lain itu mungkin ke masyarakat perkotaan bisa mungkin relatif Hari ini sedang kita dengarkan mereka lebih butuh kepada sembako. Nah apakah memungkinkan *refocusing* nanti kemudian dialihkan ke sana.

Yang terakhir, sebentar lagi juga musim panas. Terkait denganantisipasi kebakaran hutan. Artinya dengan pemotongan anggaran yang ada, kira-kira seberapa besar. Apakah benar apakah kemudian nanti tidak terpikirkan dari sisi realokasi itu antisipasi penanganan Karhutlah ini.

Itu saja Pimpinan terima kasih. Dan terima kasih untuk semuanya, untuk Bu Menteri.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Nasdem, Pak Fauzi Amro wong Palembang.

F-NasDem (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Halo. *Assalamuallaikum.*

Ketua yang baik hati dan ganteng,
Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen yang saya hormati, yang saya banggakan.

Saya mewakili ... mati lampu. Pertama Pak Ketua saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri beserta jajarannya dalam menghadapi COVID-19.

Yang kedua, yang menjadi pertanyaan saya Bu. Pertama, ada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 bahwa KLHK itu ... pengurangan kurang lebih 1,6 Triliun, dari anggaran 9,3 menjadi 7,7. Yang kedua ada Inpres Nomor 4 Tahun 2020 yang memfokuskan recofussing anggaran, relokasi anggaran, pengadaan barang dan jasa dalam rangka menghadapi COVID. Nah pertanyaan mendasar saya Ibu Menteri, kita recofussing kegiatan anggaran ini mengacu Inpres Nomor 4, atau sudah bagian dari Perpres Nomor 54 pengurangan 1,6. Kalau KLHK dikurangi 1,6 Triliun, jadi 7,7 Triliun sekarang ini Bu. Nah apakah mengambil recofussing relokasi anggaran itu dari sumber 7,7 Triliun. Itu pertanyaan yang kedua.

Yang ketiga Bu, saya sudah membaca masing-masing mulai dari Sekjen dan Dirjen tadi bahwa semua melakukan kegiatan pengadaan dalam rangka COVID-19 ada masker, ada Alat Pelindung Diri, ada hand sanitizer, dan yang lain-lain. Nah usul konkrit saya Bu Menteri, relokasi anggaran untuk Bansos itu wajib melibatkan kawan-kawan Komisi IV minimal kawan-kawan yang berada di Komisi IV terutama pemberiannya untuk petani-petani yang terlibat daripada COVID-19 ini.

Nah ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan dari Fraksi Partai Nasdem dan kami mengapresiasi. Kalau ada CSR atau pun bantuan konkrit baik dari KLHK maupun usulan dari Pak Ketua tadi, dari HTI, dari pengusaha-pengusaha itu yang terlibat didunia kehutanan mohon dilibatkan kawan-kawan Komisi IV.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Fauzi.

Selanjutnya Pak Muslim.

Silakan Pak Muslim.

F-PD (MUSLIM, S.H.I., M.M.):

Pak Ketua, terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Ketua dan jajaran Komisi IV,
Terima kasih Bu Menteri beserta jajarannya.

Pertama tentu saya memberikan apresiasi ke Bu Menteri, artinya dalam rangka begitu sigap, tepat dengan konteks penanganan COVID-19. Termasuk juga pengadaan APD buat tenaga medis, buat karyawan. KLH ini saya pikir kita berikan apresiasi kepada Bu Menteri ya.

Yang kedua tentu berkaitan dengan refofussing atau pun relokasi anggaran Bu Menteri. Tentu dalam hal ini saya melihat ini kan yang sangat merasakan dampak daripada ini kan pelaku-pelaku dibidang kehutanan khususnya kelompok-kelompok tani atau masyarakat yang bergerak dibidang kehutanan. Tentu harapan saya mungkin Ibu Menteri bisa menjelaskan ini, adakah relokasi anggaran khususnya kepada kelompok-kelompok tani kehutanan. Apalagi saya lihat ini ada 3 Taman Nasional yang ditutup termasuk juga Taman Wisata Alam, kemudian juga ada suaka marga satwa. Nah ini mungkin bisa menjadi perhatian oleh Ibu Menteri.

Yang kedua, kita tahu betul bahwa daya beli masyarakat khususnya yang bergerak dibidang kehutanan, apalagi yang berkaitan dengan petani-petani ... dan lain-lain tentu harapan. Ini kita minta juga ada relokasi anggaran oleh Bu Menteri untuk membeli produk-produk olahan mereka ini bisa dijadikan sebagai sumber energi, sumber vitamin buat tenaga-tenaga medis. Ini juga mungkin perlu direlokasikan anggaran-anggaran ini kepada khususnya petani-petani kita yang sulit mereka untuk memasarkan hasil-hasil ini supaya bisa dibeli oleh Kementerian Kehutanan.

Terakhir Pak Ketua. Saya sepakat dengan Pak Ketua tadi. CSR yang ada di perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan ini panggil segera tentu mereka kita lihat apa kontribusi mereka, apakah dalam bentuk sembako, apakah dalam bentuk masker dan lain-lain ini menjadi perhatian buat kita semua.

Itu sementara Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Muslim.

Selanjutnya Pak Ichsan.

Pak Ichsan?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bismillahirrahmairrahim.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang tersayang Ketua Komisi IV, Ibu Menteri.

Jadi saya hanya mengusulkan sedikit saja tambahan dari beberapa teman-teman. Yang saya lihat memang akibat dari COVID-19 ini ada beberapa hal yang menjadi problem khususnya di desa. Karena kehutanan kan juga sebenarnya di desa-desa disekitar hutan juga ada problem terkait dengan yang tadi teman-teman sampaikan pengadaan sembako misalnya begitu. Saya melihat bahwa ada beberapa bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bisa diberikan kesana tetapi kemudian. Ini sebenarnya sudah ada sebenarnya ... seperti Bank Pesona misalnya. Nah kalau boleh, selama ini kan aturannya hanya untuk usaha-usaha produktif tetapi karena kondisinya sangat emergency seperti ini yang saya khawatirkan kalau COVIDnya sampai di bulan Agustus misalnya. Kita khawatir kemudian problem lumbung pangan di desa ini kan menjadi masalah. Kalau boleh saya usulkan Ketua, Bu Menteri agar Bank Pesona itu aturannya juga sedikit diubah sehingga penerima-penerima Bank Pesona itu ataupun basis-basis yang lain seperti ... itu bisa direalokasikan untuk penguatan lumbung pangan desa. Saya berharap ini bisa dilakukannya karena kita khawatir betul. Akibat COVID-19 ini lumbung-lumbung pangan di desa ini menjadi problem karena tidak ada distribusi. Bukan tidak ada, sangat minim distribusi karena faktor physical distancing dan sebagainya. Saya minta agar betul-betul Bansos seperti Bank Pesona itu bisa direlaksasi sedikitkah agar jangan hanya untuk penanaman ataupun untuk usaha-usaha produktif tapi untuk pengadaan lumbung pangan desa di desa-desa sekitar hutan. Begitu juga kalau ... realokasi misalnya. Saya berharap kegiatan terkait dengan kegiatan-kegiatan penguatan lumbung pangan desa melalui bantuan-bantuan sosial itu perlu diperkuat, perlu ditambah juga walaupun terjadi pengurangan ya alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya perjalanan dinas. Tetapi kalau boleh direalokasikan kearah sana Pak Ketua. Itu Ketua saya usulkan.

Terima kasih Ketua.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ichsan.

Selanjutnya Pak Haji Sutrisno.

Silakan Pak Haji.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

... Komisi IV, Ibu Menteri beserta jajarannya.

Langsung saja saya. Tadi Ibu telah menjabarkan bahwa Perpres 54 Tahun 2020, Presiden Pemerintah telah mengurangi anggaran Kementerian dari 9,319 menjadi ... sekitar 1,6 Triliun. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman agar kita pun juga memudahkan pengawasan, publik juga tahu. Saya kira Ibu Menteri perlu segera menyesuaikan relokasi anggaran itu pada setiap unit kerja yang ada di lingkungan Kementerian KLHK.

Kemudian yang kedua, meneruskan program ... termasuk penyelesaian program kegiatannya. Karena anggaran itu kan awalnya disepakati oleh Komisi IV tentunya perubahan pengurangan itu pun juga akhirnya penjabarannya harus segera mendapatkan persetujuan dari Komisi IV agar jangkan kemudian Kementerian sudah ... tapi kita juga belum melakukan kesepakatan terhadap program-program penyesuaian.

Yang kedua, ... prioritas ini perlu diprioritaskan untuk menjaga kehidupan ekonomi masyarakat ... bawah, seperti pada Ditjen ..., Ditjen PPI, ada program peningkatan polisi hutan untuk melakukan pengamanan hutan dan kebakaran. Akan lebih baik manakala memberdayakan masyarakat peduli api dengan memberikan fasilitas misalkan bantuan kambing kemudian ... kebakaran Taman Nasional Gunung Ciremai yang sampai hari ini baru ditanami oleh masyarakat secara sukarela. Itu juga bisa dipadat karyakan. ... multi manfaat, rakyat didorong ke hutan, terhindar dari komunikasi dengan masyarakat-masyarakat luar, kemudian juga bisa produktif untuk beraktivitas membangun kerajaannya. Sehingga ekonomi rumah tangga bisa terbangun. Dengan begitu juga penurunan pertumbuhan bisa ditingkatkan. Karena kalau tidak bisa minus pertumbuhannya 0.4%.

Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan penanggulangan COVID-19 nampaknya Kementerian KLHK sudah melakukan aktivitas. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, jangan sampai terjadi tumpang tindih agar aktivitas ini perlu koordinasi dengan penanggung jawab. Syukur-syukur ada zonase. Jangan kemudian akhirnya semua tumpang tindih 1 tempat, seperti di dimasyarakat ... seperti kita kampanye dulu, nerima kostum ... dari mana-mana, nerima bantuan juga tumpang tindih dari mana-mana. Yang berhak menerima tidak menerima, yang tidak berhak menerima malah menerima. Jadi saran saya perlu ada koordinasi agar ... dalam penyampaiannya.

Yang terakhir, usul penurunan pajak ekspor. Dari 50% menjadi 5%. Saya agak bertanya, di satu sisi pada saat kondisi keuangan negara sedang kesulitan, penerimaan negara kesulitan. Harus ... ekspor ditingkatkan agar pendapatan Rupiah meningkat. Malah ada usulan penurunan pajak ekspor ..., pertimbangannya apa. ... (suara tidak jelas) U\$ tentunya juga kan Dollarnya pun ... lebih baik. Saya ... konsiderannya, pertimbangannya. Apa

pertimbangannya? Apakah akan meningkatkan ekspor dengan diturunkannya dari ... jadi 5% tapi korelasinya tidak kuat itu.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Firman Soebagyo.

Silakan Pak Firman.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.M.):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan yang saya hormati,
Bu Menteri beserta jajarannya yang saya hormati.

Pertama, kami memberikan apresiasi terhadap apa yang telah disampaikan Bu Menteri yang telah secara komprehensif telah secara jelas langkah-langkah apa, atau langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan dalam rangka untuk penghematan anggaran untuk mengcover terhadap pandemi COVID-19. Namun tentunya Bu Menteri kami ingin menegaskan kembali bahwa menurut hasil rapat yang dilakukan Komisi IX bersama Ketua PNBP dan BIN disinyalir bahwa COVID pandemi corona itu akan berakhir itu pun masih bisa kemungkinan panjang itu adalah pada bulan Juli. Artinya bahwa yang terkait dengan apa yang disampaikan Pimpinan tadi. Rentang kebakaran ini juga akan berdampak terhadap masalah terjangkitnya virus corona. Oleh karena itu pertama yang kami inginkan adalah infokusing terhadap masalah membantu ... masyarakat yang terkait dengan imbas kebakaran hutan yang berdampak terhadap sesak nafas ini akan sangat rentan terhadap penyebaran virus corona.

Oleh karena itu yang perlu disiapkan, pertama adalah kepentingan hutan ini mesti akan menyiapkan effort yang besar karena Ketua PNBP sekarang juga merangkap menjadi Satgas khusus dari COVID corona. Artinya mereka ketika nanti terjadi kebakaran mereka akan tidak optimal didalam masalah membantu daripada kehutanan selama ini.

Nah berikutnya Bu Menteri, yang terkait dengan penyediaan daripada antisipasi COVID corona. Mohon juga mendapat perhatian sebelum melangkah kepada masyarakat secara umum. Tentunya di internal Kementerian. Ini juga mendapatkan perhatian khusus terutama yang terkait dengan staf-staf yang melaksanakan pelayanan publik. Karena di DPR ini

baru saja kami mendapat informasi di Badan Legislasi, ada juga yang hasil test kemarin. Ada juga yang terpapar virus corona yang mulai hari ini Baleg di isolasi selama 14 hari. Oleh karena ini tidak menutup kemungkinan karena ... pelayanan publik yang bertugas ... sangat rentan dengan penularan virus corona.

Yang terakhir Ibu Menteri, saya sepakat dengan Pak Ketua tadi. CSR-CSR daripada perusahaannya dioptimalkan betul. Selama ini kan mereka mengguna jasa untuk kebutuhan mereka, kepentingan mereka. Ini mungkin bisa dioptimalkan agar fokus terkait dengan masalah pengadaan sembako karena ... masuk pada bulan Ramadhan dan kemudian nanti ada Idul Fitri, ekonomi masyarakat ditingkat bawah sekarang ini daya beli sangat rendah. Dan semua kegiatan stagnan. Oleh karena itu untuk persiapan tidak hanya masker tapi mungkin sembako dan lain sebagainya itu bisa dikaitkan dengan CSR-CSR khususnya Ibu harus fokus ke masyarakat wilayah kehutanan. Jadi ini yang tentunya harus menjadi perhatian.

Paling akhir adalah stimulus yang Ibu lakukan cukup bagus. Namun Bu pelaksanaannya kan ini juga ada keluh kesah daripada masyarakat, Presiden sudah menghimbau bahwa untuk penagihan kartu kredit juga ditunda, kemudian ada juga bunga-bunga Bank itu minta ... tapi ... Bank tidak melaksanakannya sampai hari ini. Nah oleh karena itu stimulus yang Ibu lakukan ini cukup bagus. Oleh karena itu mohon juga diperhatikan pelaksanaan supaya tidak tumpang tindih dan kemudian pengawasannya. Karena data kita ini masih belum akurat. Jangan sampai nanti programnya cukup baik malah justru yang menerima orang yang tidak berhak. Saya rasa ini yang kami tekankan. Dan kami mendukung penuh langkah ... Inshaa Allah teman-teman dari mitra kerja kehutanan diberikan kesempatan ... (suara tidak jelas).

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Firman.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi PKB. Pak Muhtarom silakan yang barusan datang.

Silakan Pak.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Yang saya hormati Ibu Menteri KLHK dan seluruh jajaran.

Langsung saja. Yang pertama yaitu saya sependapat dengan Anggota yang didepan yaitu dana rerecofussing KLHK ini masih terlalu kecil. Bagaimana kalau ini juga ditingkatkan seperti Kementerian yang lain mitra Komisi IV yaitu kemarin itu ada 10% lah, kurang lebihnya seperti itu.

Kemudian dilaporan Ibu Menteri, itu ada Dirjen ... dengan anggaran 48 Miliar sekian. Disana ada KBR dan KPD. KBR, KPD ini pagu baru atau sudah lama karena yang lain itu sudah disebut sasarannya tapi yang ini potensinya disebut tapi sasarannya tidak atau belum disebut. Kalau memang ini pagu baru bagaimana kita mengakses itu. Karena saat ini sudah mulai di penghujung musim penghujan. Kalau memang ini program yang harus dilakukan di Tahun 2020 harapan kami segera bisa realisasi biar nanti bisa ditanam di musim penghujan Tahun 2020 ini.

Berikut, yaitu saya harapkan KLHK memperhatikan kepada para pengelola Taman Nasional. Karena dengan diberlakukannya physical distancing ini tidak menutup kemungkinan tempat-tempat wisata ini tidak banyak pengunjung atau tidak ada pengunjung. Jangan terjadi nanti begitu tidak terlalu banyak pengunjung menjadi kawasan kumuh. Maka ini juga mohon diperhatikan baik kebersihan lingkungan dan para karyawannya, boleh jadi kalau ada potensi diberikan insentif.

Berikut, saya mohon dari Kementerian ini ada perlakuan agak longgar. Ada para petani hutan yaitu LMDH atau organisasi yang lain, bagaimana mereka-mereka ini diberikan kesempatan untuk memanfaatkan tegakan yang kosong. Kalau musim seperti ini biasanya yang cocok adalah jagung dan empon-empon. Yang lain ini sangat memungkinkan karena lahannya lahan kritis yang sangat memungkinkan bisa ditanami hal tersebut.

Kemudian berikut yaitu KPH ini mohon aktif turun ke wilayah karena apa pun mereka yang menjadi ujung tombak di setiap Kabupaten, bagaimana Beliau ini aktif turun ke wilayah melihat bagaimana para petani di wilayah sekitar hutan.

Terima kasih.

Itu Pimpinan yang dapat kami sampaikan.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya Pak T.A. Khalid silakan.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan, dan seluruh Anggota Dewan yang saya muliakan.
Bu Menteri dan seluruh jajaran yang saya banggakan.

Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan sehingga walaupun jarak jauh kita masih bisa melaksanakan tugas negara ini. Mengingat waktu langsung saja, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sutrisno yang menyangkut dengan kebijakan lanjutan tentang penurunan pajak ekspor ... juga tentang usulan relaksasi kebijakan Kementerian menyangkut dengan pembayaran DL dalam mata uang Rupiah. Kemudian keringanan membayar PNPB, kemudian juga penghapusan pajak 10% atas kayu bulat. Saya pikir luar biasa dari Kementerian, sudah langsung menyentuh para pengusaha.

Maka oleh karenanya ijin pada kesempatan ini, saya harap kepada kita semua terutama Kementerian KLHK bahwa COVID ini jangan disaat kondisi begini yang merasakan hanya rakyat dimana kita juga tidak berusaha ... mendapatkan fasilitas penurunan-penurunan pajak.

Maka oleh karenanya saran teman-teman menyangkut CSR harus menjadi perhatian dan acuan kita bersama agar mereka juga merasakan dan ikut terlibat membantu Republik ini, membantu negara ini, membantu masyarakat ini agar penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat disektor kehutanan dapat terbantu. Sehingga refofunding anggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat kita lebih bisa memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan dan ketahanan, dan kepentingan-kepentingan kelompok tani perhutanan Sehingga saya melihat di hampir semua Dirjen itu melakukan pengadaan alat kesehatan mencegah COVID. Itu bagus. Tetapi saya berharap dengan adanya bantuan CSR dari perusahaan-perusahaan yang mendapat kebijakan-kebijakan akibat COVID, keuntungan-keuntungan akibat COVID akibat penghapusan pajak dapat diberikan kepada Kementerian Kehutanan sehingga anggaran refofunding kita lebih kita utamakan kepada kehidupan masyarakat kehutanan itu sendiri. Misalnya seperti di Dirjen PHPL. Dimana disitu saya melihat ada refofunding anggaran terhadap tambahan bantuan ekonomi produksi. Juga di Dirjen PDASHL, saya melihat ada penambahan 204 unit kebun bibit rakyat dan 170 unit kebun bibit desa. Maka oleh karenanya, saya berharap refofunding anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih pada sektor-sektor yang langsung meningkatkan produktivitas para petani di sektor kehutanan. Sehingga bantuan CSR bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mencegah COVID. Apalagi mungkin seperti misalnya saran Pak Firman tadi, mereka bukan hanya membantu alat kesehatan tetapi bagaimana juga membantu pangan untuk menyelamatkan perut para petani di sektor kehutanan.

Itu harapan dan mohon perhatian kita semua dan doa kita bersama. Semoga COVID ini cepat berlalu dari Republik ini. Aamiin.

Terima kasih Ketua.

Salam hormat kepada Bu Menteri dan teman-teman semuanya.

*Wabilluhitaufiq Walhidayah,
Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Panggah.

Silakan Pak Panggah.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Baik Pak.

Terima kasih Pak Ketua serta rekan-rekan Anggota Dewan. Ibu Menteri serta jajarannya.

Kami menyambut baik dari apa yang sudah diupayakan oleh Kementerian LHK terkait dengan antisipasi atau menghadapi bencana atau wabah COVID-19 ini. Namun sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Semangat rekan-rekan di legislatif ini sudah sangat luar biasa yaitu dengan dipotong gaji, dan juga rekan-rekan di DPRD juga. DPRD I, DPRD II juga mempunyai semangat yang sama. Mereka juga menyumbangkan gajinya 1 bulan, 2 bulan untuk membantu secara langsung apa yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Memang dampak dari COVID ini mempunyai dampak disemua sektor dan disemua kalangan. Namun yang paling berdampak langsung adalah mereka-mereka yang ada di level bawah yaitu mereka-mereka yang tinggal di pedesaan. Ini kami rasakan sekali. Tentu saja kalau dari sumber di legislatif ini sangat-sangat terbatas. Seberapa sih sumbangan gaji dari kita-kita ini. Yang lebih banyak bisa dialokasikan lebih banyak mestinya di pendanaan dari APBN maupun APBD. Itu yang saya kira, kita minta supaya ini lebih bisa dialokasikan lebih besar lagi. Tadi Pak Muhtarom menyampaikan kalau bisa 10% itu lebih bagus. Khusus pada sasaran-sasaran mereka yang berdampak langsung yaitu masyarakat dibawah. Rata-rata mereka yang diminta adalah soal, kalau di rumah sakit-rumah sakit ini banyak kelangkaan sekarang ini yang terkait dengan Alat Pelindung Diri.

Kemudian kalau di masyarakat luas ya ada sanitizer, masker, dan tadi banyak sekali rekan-rekan yang menyampaikan masalah sembako atau logistik. Ini betul-betul mereka mengharapkan kehadiran kita itu dibawah terutama kita-kita ini. Yang ada di Dapil-Dapil ini jelas itu langsung ditanya, jangan hanya kalau pas mau Pemilu saja datang. Sekarang Anda bagaimana ini? Nah ini paling terasakan disitu.

Nah tadi sudah bagus itu, misalnya ada madu hutan. Madu hutan mungkin bisa dijadikan paket selain paket-paket yang lain. Karena saya tahu itu, banyak sekali usaha-usaha madu hutan itu dilaksanakan oleh para petani disekitar hutan, di Danau Sentarum itu banyak sekali madu-madu hutan yang sudah diproduksi. Saya kira itu juga kalau dimasukan didalam paket bantuan katakanlah sembako atau bantuan langsung kebawah ini saya kira akan

sangat terasakan langsung oleh mereka-mereka kehadiran kita-kita semua ini di masyarakat bawah.

Itu saya kira. Saya menekankan saja sekali lagi. Ini kita belum tahu sampai kapan. Secara formal sih tanggal 29 Mei, tapi bisa sampai Juli, bisa sampai Agustus kita tidak ngerti. Jadi kami mohon supaya tadi yang sudah disampaikan Ibu Menteri terkait beberapa itu termasuk kelanjutan usaha padat karya, kemudian stimulus ekonomi, pelayanan publik dan lain-lain itu bagus tapi coba diprioritaskan lebih fokus lagi pada jangka pendek. Kita ngomong jangka menengah saja saya kira sekarang orang agak sulit bicara. Tapi meskipun demikian perlu dipikirkan. Tapi yang lebih langsung kita coba rasakan di masyarakat bawah karena kami terjun kebawah itu adalah itu seperti yang kami sampaikan.

Nah ini kalau bisa dengan bersama-sama kita dari legislatif, eksekutif bersama-sama terjun kebawah mereka akan bisa merasakan oh ya benar bahwa Pemerintah hadir, Negara hadir. Saya kira itu saja Pa, kami menekankan sekali lagi apa yang sebenarnya sudah disampaikan dari banyak teman tadi.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Panggah.

Selanjutnya Pak Azikin Solthan.

Silakan Pak Azikin.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Ketua dan segenap Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Ibu Menteri beserta segenap Eselon yang mendampingi.

Bapak Ketua yang kami hormati,

Bahwa dampak dari pandemi COVID-19 terpaksa Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan termasuk Peraturan Pemerintah yang berdampak dilaksanakannya reconfiguring program dan relokasi anggaran Kementerian dan Lembaga termasuk Kementerian/Lembaga Kehutanan. Sehubungan dengan hal tersebut kami ingin menambahkan 2 point yang telah disampaikan oleh Pak Darori. Yang pertama, kami mengusulkan agar penambahan program-program berfokus pada produksi tanaman hutan cepat panen, program Bank Pesona difokuskan untuk pangan, budidaya hutan tanaman obat dan pemanfaatan lahan perhutanan sosial untuk tanaman

pangan dengan cara Yang kedua, pendampingan hukum untuk para petani hutan agar dapat memperoleh relokasi kredit yang bersumber dari Perbankan.

Demikian 2 point yang kami sampaikan.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Azikin.

Teman-teman Anggota tadi sudah menyampaikan tanggapannya. Yang terakhir Ibu Riezky Aprilia dari Fraksi PDI-Perjuangan. Silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ibu Menteri beserta jajaran,

Saya ingin menyampaikan beberapa point saja. Mungkin memperkuat atau juga mungkin penambahan dari teman-teman yang sudah disampaikan tadi.

Pertama terkait kondisi hari ini diharapkan memang program-program direct untuk memungkinkan langsung ke masyarakat itu dengan upgrading volume kalau ... yang teman-teman sampaikan tadi. Contoh tadi dari tadi mungkin ada pembahasan terkait KBR atau Bank Pesona. Besar harapan kami karena ini ... program yang bisa direct ke masyarakat ya mungkin kurang lebih padat karya yang itu mungkin bisa kita langsung lakukan kepada masyarakat. Mungkin penekanan sekali lagi apakah visible untuk dilakukan upgrading volume untuk program-program yang seperti KBR atau pun Bank Pesona.

Kemudian terkait dengan BRG juga. Saya ingin memastikan karena beberapa kali saya pelajari bahwa BRG pun punya program-program yang mungkin bisa supporting untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki lahan gambut untuk melakukan hal yang serupa dengan program-program yang mungkin bisa ... untuk membantu kondisi hari ini untuk masyarakat disekitar lahan gambut. Dan kemudian saya hanya mengingatkan, habis COVID mungkin. Yang tadi juga teman-teman sampaikan terkait kebakaran hutan. Jangan sampai langkah untuk mengantisipasi dan meng-counter nanti kebakaran hutan ini juga cenderung terlambat.

Kemudian saya juga ingin mohon dijelaskan kembali apakah, takutnya saya yang salah tangkap atau teman-teman juga salah tafsir. Ada juga

bantuan seperti hand sanitier atau masker yang dibantu melalui Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan ini seperti apa mekanismenya. Karena saya tadi menggarisbawahi ada ekspektasi dari rekan-rekan untuk bisa juga terlibat didalam kondisi hari ini untuk mengantisipasi membantu masyarakat. Sekali lagi kepada jajaran Kementerian, kami berharap banyak agar program-program ini bisa langsung ke masyarakat. Dalam arti kata, apa pun yang terjadi jangan sampai menimbulkan bibit-bibit permasalahan baru kedepannya. Modifikasi program sangat penting, upgrading volume hari ini dengan kondisi hari ini ... dari kota ke desa juga besar. Jadi saya harap modifikasi program juga menjadi pertimbangan teman-teman di Kementerian.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Demikian pertanyaan, tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV.

Selanjutnya persilakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan jawabannya.

Silakan Bu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Pak Ketua.

Terima kasih. Yang kami hormati bimbingan Ibu/Bapak Anggota Komisi IV DPR RI. Saya berterima kasih atas berbagai masukan yang semuanya bagus-bagus menurut saya. Dan memang ada didalam pemikiran KLHK juga. Tetapi memang ada beberapa keterbatasan.

Terus terang yang terkait dengan pengadaan sanitizer dan lain-lain itu kenapa biar tersebar di Direktorat Jenderal? Karena sebetulnya untuk penyelamatan penyebaran di lingkup KLHK sendiri. Saya agak ragu ketika ... APBN-nya KLHK dipakai untuk pembelian sanitizer buat publik, karena itu tidak terkait langsung dengan Tupoksinya KLHK. Kemudian begitu juga dengan pangan.

Oleh karena itu atas dorongan dan dukungan yang terhormat Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota. Saya kira ini sangat dikombinasikan dengan usulan-usulan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan tadi dia kita kaitkan dengan katakanlah swasta-swasta untuk mendukung target ... dan mitra-mitra masyarakat. Jadi kalau yang pegawai memang bisa Tupoksinya langsung ke APBN tetapi kalau yang diluar Tupoksinya harus disesuaikan. Oleh karena itu Pimpinan, kami mengusulkan bahwa untuk CSR

bantuan ... kemudian sembako. Kalau boleh kami mengusulkan Pimpinan, kita buat Tim Kecil bersama antara KLHK dan Setkom IV supaya sasaran tadi tempat Bapak ke Dapil-Dapil dan juga nanti kami bersama-sama Asosiasi. Oleh karena itu sasarannya akan dapat, kemudian sasaran kepada masyarakatnya kita dapat, administrasinya di sistem anggaran KLHK tidak jadi masalah di BPK. Oleh karena itu saya kira tidak sulit untuk KLHK mengundang Asosiasi. Kita juga sebetulnya sudah mengawali tetapi saya minta polanya swasta dan pola HTI dengan mitra pembinanya. Tapi arahan yang sangat baik dari Pimpinan dan Ibu/Bapak Anggota, bahwa ini dikonsolidasikan. Dan mohon ijin nanti kami mencoba memikirkan bagaimana rule basenya bagaimana aturan mainnya. Tapi pada dasarnya menurut saya bisa karena kita punya instrumen-instrumen yang lain selain APBN.

Oleh karena itu tadi konsep CSR, kemudian bantuan sarana pencegahan COVID, hand sanitizer, masker dan lain-lain serta sembako ini mungkin bisa jadi satu paket dengan kita mengkonsolidasikan CSR tersebut bersama-sama dengan Saya nanti juga akan minta secara khusus Dirut Perhutani juga terlibat untuk soal ini Pak Ketua dan Ibu/Bapak Anggota Dewan yang terhormat.

Kemudian, saya berterima kasih. Yang kedua yang sangat prinsip tadi ditanyakan adalah apakah refofusing ini ke Inpres ... atukah ke Perpres 54. Saya mohon ijin, tadi saya mengatakan diawal bahwa dengan demikian konfigurasi yang kami usulkan ... di paparan itu menjadi tidak relevan lagi setelah keluarnya Perpres 54. Oleh karena itu tadi kami meminta arahan dan mengusulkan kepada Pimpinan dan Ibu/Bapak Anggota dengan arahan-arahan yang ada tadi dari yang terhormat Pimpinan dan Ibu/Bapak Anggota, kita akan melanjutkan exercise kembali. Dengan demikian berarti refofusing kita lakukan bersamaan, simultan dengan penyelesaian Perpres 54 ketika dana KLHK dikurangi 1,582 Triliun. Jadi posisinya seperti itu.

Kemudian soal. Memang kita mengantisipasi masalah sampah. Kita bisa membayangkan bahwa sampah akan banyak betul. Dirjen PSLB3 sudah mengantisipasi awal, sudah memberikan sosialisasi, sudah menginformasikan kepada Kepala-Kepala Dinas LH di Daerah. Kemudian saya juga akan memperhatikan tadi catatan tentang impor barang baku industri kertas atau plastik yang mengandung sampah, itu yang harus sangat kita perhatikan.

Kemudian tentang stimulus ekonomi. Sebetulnya KLHK tidak ada kaitan dengan KSSK. Stimulus ekonomi kami usulkan kepada Menko Perekonomian. Karena secara keseluruhan kebijakannya dalam bentuk keuangan dan moneter itu diformulasikan akhirnya oleh Kemenko. Dan saya tahu persis konsultasinya juga insentif antara Menteri Keuangan, Kemenko, kemudian OJK dan Bapak Presiden.

Jadi Bapak/Ibu, Pimpinan yang terhormat,

Kami melaporkan yang kami usulkan dan kami konsultasikan kepada Bapak Menko Perekonomian. Jadi seluruhnya, prosesnya, artikulasinya ada di Kemenko.

Kemudian saya berterima kasih atas warning tentang karhutlah. Jadi kita antisipasi. Kita memang sudah selesai melewati masa sulit vase 1 di Riau yang sebetulnya sangat gawat diantara bulan Februari pertengahan sampai dengan April pertengahan. Tapi kami juga terus mewaspadai bahwa nanti masuk di bulan Juni itu akan gawat lagi. Sekarang saya masih mengikuti terus jumlah hotspot. Memang data kemarin dan hari ini masih ada hujan. Jadi angkanya ada yang nol, satu paling sedikit. Tetapi 3 minggu lalu, 2 bulan lalu, itu sudah bikin deg-degan juga hotspotnya sampai angka biasanya kalau sudah diangka 100 atau diangka 80 untuk Riau itu sudah bikin deg-degan. Tapi kemarin saya lihat angkanya sudah di nol. Jadi itu sebetulnya karena hujan dan lain-lain tetapi ... itu memang ada, setiap tahun kita ikuti perkembangannya lalu ada polanya.

Terima kasih banyak bahwa kami memperhatikan ini. Dan terima kasih dukungan bahwa mengatasi karhutla yang akan datang itu sebetulnya merupakan usaha yang sangat besar. Karena tepat yang disampaikan oleh yang terhormat Anggota DPR bahwa COVID dengan penyakit ISPA (infeksi saluran pernafasan atas) itu sangat dekat kerentanannya. Jadi karhutla juga kalau orang kena ISPA kemudian sesak karena asap itu juga sangat rentan. Jadi kami perhatikan tentang ini.

Saya menerima dengan baik semua catatan-catatan. Kemudian ... dengan persoalan itu. Kementerian berusaha secara terus menerus. Saya menandatangani cukup banyak surat kuasa kepada Jaksa Agung ..., kepada Pengadilan Negeri dan lain-lain untuk kita dibantu. Memang tidak mudah karena banyak saja alasannya adalah bangkrut, atau apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi sebetulnya bukan tidak ada progress, karena dari 18 Triliun itu. Nanti Pak Dirjen ... akan saya minta mengirim datanya melalui Sekretariat Komisi IV. Datanya ada, mungkin sudah 100 berapa Miliar Jadi bukan tidak ada sama sekali. Tapi kami perhatian dan saya akan berikan perhatian khusus untuk ini.

Kemudian terkait dengan PDASHL Kita memang sejak bencana alam yang sangat berat KLHK kelihatannya sekarang juga menjadi bagian tumpuan dari penyelesaian masalah bencana alam. Saya mohon ijin melaporkan pada kesempatan ini bahwa pada tanggal 25 Maret telah terjadi kembali longsor di Desa Harkatjaya, Kecamatan Sutajaya Kabupaten Bogor. Itu kira-kira 1,5 sampai 2 kilo di bagian utaranya dari yang longsor di tanggal 7 Januari tahun ini. Memang mahkota longsornya disana sangat banyak, ... juga banyak, dan saya memahami posisi Kepala BNPB yang sedang sangat-sangat intens, sibuk. Oleh karena itu saya meminta Dirjen PDASHL didukung oleh pak Sekjen untuk melakukan koordinasi dengan Dirjen Pengairan dan staf BNPB, serta Pemerintah Daerah, dan kita sudah mulai tangani. Kita juga membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Saya juga mohon ijin melaporkan bahwa pada tanggal 3 April terjadi bencana banjir di Kecamatan Makale di Tana Toraja. Nah ini datanya sedang dipersiapkan. Sudah ada analisis dari PDASHL Kami sudah meminta para Dirjen untuk ngecek dilapangan. Nah dalam kaitan itu, maka terhadap kegiatan RHL itu dilakukan modifikasi. Modifikasinya adalah nanti akan kami

laporkan lebih detail didalam Rapat Kerja berikut ketika kami melaporkan exercise dari recofussing dan penghematan anggaran ini. Modifikasinya adalah pada daerah-daerah yang bencana alam. Jadi pengalaman dari bencana bulan Januari ternyata penduduk yang diungsikan. Ya pada saat itu 53 rumah, penduduknya diungsikan berminggu-minggu tidak ngapa-ngapain. Akhirnya dengan kegiatan RHL konservasi tanah dan air, ... penahan, keranjang kawat, dan lain-lain. Itu akhirnya mereka bisa bekerja dan kita akan masukan juga ini dalam format paket padat karya. Itu satu jenis paketnya. Nah jadi ada KTA, ada agro forestry dan ada Fetifernya Kota yang lain. Ada kebun-kebun bibit desa yang secara cepat harus disiapkan. Apa bedanya kebun bibit desa dari kebun bibit rakyat adalah semacam mungkin KBD ini kakaknya KBR. Kalau KBD itu produksinya hanya 20.000.

Bapak dan Ibu, Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

Kalau KBR itu misalnya produksinya antara 10 sampai 20.000 batng bibit maka KBD ini harus diatasnya. Karena dia mengcover daerah-daerah bencana itu, dan daerah-daerah yang hulunya sangat-sangat kritis. Itu kira-kira paket-paketnya seperti itu. Nanti kami akan minta Dirjen PDASHL menyiapkan secara rinci tentang ini. Dan kalau KBD itu kira-kira produksi bibitnya itu bisa paling sedikit 40 sampai 60, 70 ribu. Baru diatasnya lagi adalah bibit persemaian. Dan nanti diatasnya lagi adalah persemaian modern. Jadi kita kelihatannya memang tidak ada pilihan lain untuk mengatasi dan mengupayakan dengan usaha yang besar untuk pemulihan lingkungan. Karena kalau ada apa-apa yang disalahin KLHK. Kalau ada apa-apa yang selalu salah kehutanan.

Jadi dengan situasi yang sangat berat, maka kami memikirkan sangat keras dan melakukan modifikasi-modifikasi. Paket yang lain paket yang konvensional. Jadi ... dari jaman pekan penghijauan jaman dulu itu masih juga ada yang kita pertahankan karena pola-pola itu memang masih relevan ditengah-tengah masyarakat.

Jadi Ibu dan Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Sekali lagi untuk konfigurasi program yang Eselon I Saya mohon maaf memohon data yang kami sampaikan itu dianggap sudah kurang relevan karena harus kita kaitkan langsung dengan konfigurasi baru menurut Inpres 4 dan Perpres 54.

Jadi secara simultan, tadi catatan-catatan yang sangat baik dan sangat berharga didalam catatan saya ada 26 halaman. Tapi tulisannya memang gede-gede karena mendengar langsung kami menulis. Jadi kami sudah rangkum secara keseluruhan Pimpinan.

Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak atas saran-saran dan dukungan yang sangat positif untuk ini.

Kurang lebih mohon maaf.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Budi.

Ya silakan Pak Budi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISASTRO DJIWANDONO):

Ya terima kasih Pak Ketua.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bu Menteri, dan Wakil Menteri, dan jajaran KLHK yang saya hormati.

Sedikit saja karena tadi Bu Menteri sempat mengemukakan masalah PDSHL. Saya ingin informasi saja di Kalimantan Timur itu khususnya di Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser baru-baru ini juga terjadi banjir akibat luapan dari DAS Kandilo. Jadi saya mohon perhatian khusus juga Bu Menteri untuk penanganan di DAS Kandilo Kabupaten Paser khususnya Kecamatan Batu Sopang. Alhamdulillah tidak terjadi korban jiwa kemarin tetapi sempat meluap dan sempat merendam 5 Desa. Pada saat itu ... biasa lebih Kecamatan-Kecamatan lain. Jadi kami mohon perhatiannya.

Sekian terima kasih.

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Budi.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Dari diskusi, dialog, saran dan masukan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebelum acara ini kita akhiri kami bacakan Rancangan kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini. Tampilkan. Tolong Ibu Menteri dan Anggota Komisi IV dikoreksi rancangan kesimpulan ini.

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima penjelasan refofussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Dapat disetujui?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju pak ketua.

KETUA RAPAT:

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Pak Ketua, boleh tidak saya nawar sendiri?

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

Karena kita rapat hari ini sudah keluar Perpres 54 dan tadi juga ingin kami kaitkan dengan arahan dari yang terhormat Anggota dan Pimpinan Komisi IV DPR RI maka kalau boleh ini bisa ditambahkan kalimatnya.

Jadi, 1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima penjelasan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 untuk secara simultan dilakukan pengaturan kembali dengan keluarnya Perpres 54. Untuk selanjutnya secara simultan dilakukan refocusing kembali dengan penghematan dan akan dilaporkan kembali pada Raker berikut di Komisi IV DPR RI.

KETUA RAPAT:

Nanti masalah yang akan dilaporkan ada di yang terakhir Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Siap Ketua.

KETUA RAPAT:

Tidak perlu dituliskan, akan dibacakan nanti terakhirnya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Demikian.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Anggota setuju?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Penghematan berdasarkan Perpres 54.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Perpres 54 Tahun 2020 Bu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Siap Pak.

Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2020.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-NasDem (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Ketua, saya mengingatkan dari awal Bu Menteri. Pertama kali itu keluar Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing*. Habis itu Perpres Nomor 54 Tahun 2020 itu terjadi pemotongan anggaran di KLHK itu dari 9,3 menjadi 7,3. Nah sekarang ini maksud saya yang 1,6 Triliun itu diserahkan kepada Pemerintah. Nah yagn kita bicarakan *Refocusing* Bu Menteri itu hanya 7,7 saja. Begitu kira-kira Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya ulangi lagi.

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima penjelasan recofussing kegiatan dan realokasi angggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 untuk selanjutnya secara simultan dilakukan recofussing dengan penghematan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Anggota setuju?

Bu Menteri?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan peningkatan anggaran pada program bantuan sosial atau bantuan Pemerintah kepada masyarakat didalam dan diluar kawasan hutan. Terutama kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial, serta para petugas yang mengabdikan dirinya dibidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terkena dampak *COVID-19* sebesar lebih kurang 770 Miliar atau equivalen 10% dari pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 yang telah direvisi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Anggota?

Ibu Menteri?

KETUA RAPAT:

Mohon tenang dulu anggota, kasih ibu menteri berbicara sebentar.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Untuk melakukan peningkatan pada program bantuan sosial atau bantuan Pemerintah kepada masyarakat didalam dan diluar dikawasan hutan. Kita ada masalah ketika ... diluar kawasan hutan. Sebab Tupoksinya KLHK kalau pada konteks hutan hanya didalam hutan, kalau mau mungkin bisa ... sedikit sehingga bunyinya ... "disekitar". Didalam dan disekitar kawasan hutan. Jadi kata-kata "luarnya" diganti dengan kata-kata "sekitar"

Pak Ketua, dan para Wakil Ketua, serta Ibu dan Bapak Anggota.

Saya melihat dengan tadi banyaknya arahan dan catatan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota itu bisa-bisa memang besar Refocusingnya. Jadi kalau boleh tidak usah disebut angka 770 Miliar dan ekuivalen tetapi kalau mau dibunyikan misalnya minimum. Sebab yang sekarang sudah perkiraan saya akan sangat besar, sebab tadi ada padat karya, konservasi, ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Tolong Anggota diam dulu, tolong Anggota dengar dulu penjelasan Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

... kami juga *exercise* dulu dari pagu anggaran yang telah direvisi. Minimum 10%. Soalnya program nasional kita yang berbasis masyarakat itu sangat banyak. Jadi perkiraan saya pasti diatas 10%. Nanti kami laporkan.

KETUA RAPAT:

Oke. Jadi saya ulangi lagi.

2. Komisi IV mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan peningkatan anggaran pada program bantuan sosial atau bantuan Pemerintah kepada masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan. Terutama kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial, serta para petugas yang mengabdikan dirinya dibidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terkena dampak *COVID-19* sebesar minimumn 10% dari dari pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 yang telah direvisi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Ibu Menteri setuju?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan peningkatan anggaran pada program kebun bibit rakyat, program kebun bibit desa, program Bank Pesona, serta program lain yang bersentuhan dengan kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan produksi dan manfaat hasil hutan yang dikembangkan.

Anggota?

Bu Menteri setuju?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ijin Ketua.

Bank Pesona itu adalah sebetulnya singkatan. Artinya Pembangunan Perhutanan Sosial Nasional. Jadi itu sebetulnya waktu Dirjennya merasa menjadi abang-abang yang mempesona maka dinamakan Bank Pesona. Kemudian saya mohon ijin, tadi catatan dari Pak Ketua sangat bagus dan saya minta maaf mohon ditambahkan selain target ... ini lingkungan yang bersentuhan langsung kepada kelompok tani hutan, kelompok perhutanan. Ini ditambahin kelompoknya. Setelah kelompok tani sosial dan ... masyarakat

peduli api, kemudian pekerja sampah, kemudian bantuan drop box. Kalau kita bikin untuk drop box untuk masyarakat itu. Tadi Pak Ketua didepan pidatonya itu rincian target ... bagus-bagus banget, ada karyawan apa, ..., kemudian drop box, dan lain-lain dalam rangka meningkatkan seperti itu Ketua. Jadi ini ingin perjas. Jadi nanti diprogramnya Sekjenya menyelesaikan. Kalau tidak nanti ... tidak ada lagi.

Demikian Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi sudah setuju ini Bu Menteri yang Nomor 3?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Setuju?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya. Setuju.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Sedikit saja ini Pak Ketua. Saya mau tanya sedikit Pak Ketua, mohon ijin.

KETUA RAPAT:

4. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut untuk tetap memprioritaskan anggaran dalam melaksanakan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Anggota?

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong perusahaan ijin pemegang usaha pemanfaatan ijin hutan kayu, dan Hutan Tanaman (HTI), ijin usaha pertambangan untuk berperan aktif dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 melalui CSR dalam bentuk Alat Pelindung Diri, serta Bantuan Sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup jelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020 bagi para petugas yang mengabdikan dirinya dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Anggota?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Masyarakat kurang Ketua, jangan hanya petugas.

F-PD (MUSLIM, S.H.I., M.M.):

Masyarakat boleh ditambah Ketua.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, yang memanggil itu Kementerian atau kita yang memanggil Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Bu Menteri ada yang mau ditambahkan?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

... Ketua. Jadi untuk mendorong perusahaan HPH dan HTI serta memegang ijin IPPKH. Pemegang ijin IPPKH jadi ... (suara tidak jelas). Jadi kita nyentuh-nyentuh nyebut-nyebut pertambangan sebab Pertambangan bukan pembinaan di kita, kecuali kita hanya kasih ijin untuk ... (suara tidak jelas). ... berperan aktif dalam percepatan penanganan ini dalam bentuk APD ,Bansos. Ada lagi, kalau hanya untuk masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan maka yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota tidak bisa kasih ke yang masyarakat lain. Padahal kan penduduk konsituennya di kota-kota yang jauh dari hutan. ... (suara tidak jelas) serta masyarakat Sesuai ketentuan. Nanti kami yang ngatur teknisnya. Kita panggil ..., kita undang Sekretariat Komisi IV untuk mengatur dengan TA. Jadi semuanya bisa jalan. Kami juga tidak nanti di komplain BPK RI misalnya begitu.

Jadi kita ... itu saja Ketua. Kalau boleh seperti itu Pak Ketua dan Bapak/Ibu yang terhormat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tolong Anggota tenang dulu. Kasih Ibu Menteri baca dulu.

Ibu Menteri, coba dilihat redaksinya sudah betul atau belum?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Sudah Ketua. Kami siap Ketua.

Terima kasih. Kami akan melaksanakan ... (suara tidak jelas).

Setuju.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Anggota silakan dilihat.

Setuju?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Saya tanya sedikit Bu Menteri.

Pak Ketua mohon ijin saya tanya sedikit.

Bu Menteri,

Kita tahu bahwa banyak juga masyarakat yang di Taman Nasional, Taman Wisata yang kerja disektor pariwisata. Nah itu mereka masuk kategori apa Bu?

KETUA RAPAT:

Itu masuk ketegori masyarakat.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Pak Ketua ... jawab. Kalau yang contohnya adalah 3 desa di Taman Nasional Komodo maka Beliau-Beliau itu 3 desa itu didalam ... KLHK. Jadi ... sudah dalam catatannya ... tetapi kita mesti harus tambahin lagi

recofussingnya apa, untuk apa. Ini sebabnya saya mengatakan bahwa kemungkinan dananya bisa lebih besar daripada 10%. Ini sudah terjawab ya.

Pak ... terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya bacakan lagi Nomor 5.

5. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong perusahaan Hak Perusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri, serta pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk berperan aktif dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 melalui CSR dalam bentuk bantuan Alat Pelindung Diri, serta Bantuan Sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup jelang Puasa dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020 bagi para petugas yang mengabdikan dirinya dibidang lingkungan hidup dan kehutanan serta masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Cukup?

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera memberikan usulan anggaran recofussing kegiatan dan realokasi anggaran sebelum Rapat Kerja tanggal 15 April 2020.

Anggota setuju?

Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Sudah Ketua. Saya tadi sudah bilang kami setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Sebelum kami menutup Rapat Kerja kami persilakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja ini.

Silakan Bu Menteri.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Ijin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Panggah.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Itu tadi ada disebutkan Bu Menteri mau dibuat Tim LHK dan Komsii IV untuk mempertajam rekomendasi yang kita berikan ini. Kalau tidak salah tadi begitu.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

Yang saya maksud tim itu adalah Tim Teknis kecil. Saya akan minta langsung dikontrol oleh Pak Sekjen. Karena kalau swastanya KLHK itu sebetulnya cukup banyak, baik di Planologi, di BPKL juga ada, di ..., juga ada. Dan saya nanti juga minta karena ... kami satu kantor.

Saya akan minta Pak Sekjen dibantu oleh Dirut Perhutani, kemudian dari DPR mungkin cukup Kabagset dan mungkin didampingi oleh beberapa Tenaga Ahli ... misalnya. Karena itu untuk mengontrol daerah-daerahnya supaya pas, supaya spesifik masyarakatnya ... yang mana dan Asosiasi.

Dengan demikian sebetulnya kita terlepas dari ikatan ... APBN karena itu sudah urusan teknis. Oleh karena itu yang saya ... adalah sebetulnya Tim Teknis untuk ... dari kegiatan itu.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Cukup Bu Menteri?

Teman-teman Anggota?

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* bila'alamin Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 12.40 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP 196301221991031001